ABSTRAKSI

PERAN MPU ACEH TIMUR TERHADAP MASYARAKAT TAHUN 2015 – 2017

Pada konteks ini MPU merupakan pihak yang dianggap penting untuk ikut menentukan kebijakan pemerintahan Aceh terutama yang berkaitan dengan syari'at Islam. Jika dibandingkan, walaupun sama-sama merupakan lembaga ulama, posisi Mpu jelas berbeda dengan MUI yang berada pada tingkat nasional maupun pada tingkat provinsi lainnya. Peran MPU dalam penerapan syariat Islam dapat dikategorikan dalam dua hal yaitu; legislasi qanun dan memberikan masukan dan pertimbangan kepada stakeholder baik berupa fatwa maupun tausyiah yang terkait dengan syariat Islam maupun bukan. Dalam konteks keacehan, pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Aceh merupakan salah satu bentuk kekhususan Aceh dalam menjalankan Pemerintahannya yang juga diakomodir oleh pemberlakuan otonomi khusus untuk Aceh. Pertimbangan lain secara filosofis, historis dan sosiologis bahwa para ulama telah memberikan kontribusi dalam membentuk pola kehidupan masyarakat yang islami, sehingga masyarakat Aceh.

Tujuan dari penelitian adalah penulis ingin mengetahui Penulis ingin mengetahui awal dan tumbuh berkembangnya MPU di Aceh Timur Penulis ingin mengetahui peran MPU Aceh Timur terhadap pembinaan Mayarakat di Kecamatan Ranto Pereulak. Penulis ingin mengetahui bagaimana dampak yang dilakukan oleh MPU dalam pembinaan masyarakat Gampong di Kecamatan Ranto Pereulak.

Metode penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah metode sejarah kritis yang mencakup empat langkah atau tahapan, sebagai berikut: mencari dan menggumpulkan berbagai jenis sumber baik primer maupun skunder. Melakukan kritik atas sumber-sumber yang dikumpulkan baik kritik ekstern maupun intern guna menguji otentitas dan kredibilitas memunculkan berbagai fakta yang diperlukan dari sumber atau mengumpulkan fakta-fakta dan menjadi suatu kisah sejarah yang lebih bermakna dan sempurna.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama merupakan lembaga ulama independen yang dibentuk pada peringkat provinsi dan kabupaten serta bertugas memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasihat serta saran dalam penentuan kebijakan daerah mengenai syariat Islam. MPU berperan dalam penetapan fatwa hukum, memerikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Dalam penulisan ini banyak terdapat kekurangan maka dari sini, penulis berharap kepada mahasiswa, khusnya dari Prodi pendidikan sejarah, baik itu yang terdapat didaerah maupun diluar daerah, agar dapat melajutkan penelitian dengan tema seperti ini, terutama terhadap sejarah tentang Tentang Peran MPU Aceh Timur Terhadap Masyarakat Tahun 2015-2017sehingga penelitian tersebut dapat menjadi sumber referensi tentang sejarah MPU di Aceh. Sehingga buku-buku tersebut dapat menjadi sumber bagi penelitian dan bagi generasi selanjutnya.

Kata Kunci: MPU dan Peranannya.